

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: Semua Ormas Silakan Mengajukan

RANCANGAN anggaran DKI Jakarta 2020 memicu polemik setelah William Aditya Sarana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia, mengungkapkan plafon pembelian lem Aica-Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, bulan lalu. Sejak itu, berbagai lembaga, termasuk pemerintah provinsi, ikut menjabarkan keganjilan.

Di antara 30 ribu mata anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 tersebut, terdapat satu program anggaran yang meningkat, yaitu dana hibah. *Tempo* mendapati dugaan dana tersebut mengalir ke kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur DKI 2017.

Berikut ini petikan wawancara Gubernur Anies dengan wartawan *Tempo* Mahardika S. Hadi, Wayan Agus, Aisha Shaidra, Hussein Abri, dan Gangsar Parikesit, Jumat lalu. Wawancara lengkap bisa Anda baca di majalah *Tempo* yang terbit hari ini.

Apa pertimbangan kenaikan dana hibah tersebut?

Bukan hanya dana hibah. Kami juga mendorong pengadaan swakelola tipe 3 dan 4. Dengan pengelolaan tipe 3 dan 4 itu, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan. Anggaran pemerintah diberikan langsung kepada masyarakat, lalu masyarakat mengelolanya. DKI Jakarta adalah provinsi pertama dan satu-satunya yang menerapkan ini. Dengan cara ini, masyarakat ikut membangun dan terlibat. Tidak hanya menonton.

Bagaimana memastikan tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatannya?

Itu tantangannya. Karena DKI Jakarta yang pertama, kami sedang belajar bagaimana memastikan tidak ada penyimpangan. Namanya uang itu selalu ada potensi penyimpangan. Inspektorat dan yang lain sedang belajar. Skalanya akan kami besarkan.

Dana hibah untuk Persatuan Guru Republik Indonesia dan Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini melonjak. Apa pertimbangannya?

Kalau itu sih undang-undangnya harus kita dorong, sehingga pendidik anak usia dini bisa berstatus guru. Dengan status guru, dia akan mendapat tunjangan kinerja dinamis seperti yang lain. Ini bukan soal mau-tidak mau, melainkan soal landasan hukumnya dia bukan guru.

Apakah 'mendukung Anda dalam pemilihan gubernur lalu' menjadi syarat bagi ormas yang memperoleh dana hibah?

Semua ormas silakan mengajukan. Ada proses seleksinya.

Anggaran janggal kembali ditemukan. Bagaimana Anda melihat efektivitas sistem e-budgeting?

Yang menjadi *concern* adalah sistem yang kami miliki saat ini tidak cukup pintar. Digital, tapi tidak melakukan proses verifikasi dan validasi atas semua data yang dimasukkan. Sehingga, saat fase perencanaan, muncul komponen-komponen yang belum tentu relevan pada saat menetapkan anggaran.

Sejak kapan item janggal itu ditemukan?

Sesungguhnya kami sudah menemukan problem ini sejak dulu. Ketika kami temukan, kami koreksi. Setelah disisir, ketemu, kenyataannya barangnya tidak jadi. Dari dulu juga enggak pernah jadi.

Ada temuan kejanggalan pada tahun sebelumnya?

Ya, setiap tahun. Justru itulah cerita yang selama ini ada. Prosesnya, disisir. Sistem digital disisir, ya seperti menulis pakai Microsoft Word terus koreksinya tetap manual, bukan pakai *auto-correct*. Padahal kan pakai Microsoft Word dapat menggunakan *word count*, *correction*, dan lainnya. Penyisiran manual seharusnya dilakukan pada saat memasukkan *item*. Misalnya, belanja lem Aica-Aibon per anak dapat 10 kilogram, lalu angkanya Rp 82 miliar. Seharusnya bertanya ulang, dong, ketika melihat itu. Karena *nampak* tidak masuk di akal, seharusnya dikoreksi.

Jadi, ini kesalahan sistem dan manusia?

Memang ini ada masalah orang. Orang yang tidak mengerjakan dengan benar. Motifnya tak bisa dibedakan. Harus diakui ada yang salah di sini. Kenapa kesalahan bisa terjadi? Ada sistem yang longgar. Harus diperbaiki keduanya. Jadi, orang harus dipaksa mengisi dengan benar. ●

Berbagai Keganjilan Itu...

Stabilo	Rp 3,7 miliar
Konsultasi RW kumuh	Rp 556 juta
Konsultasi pembangkit listrik tenaga sampah	Rp 10 miliar
Konsultasi revitalisasi Taman Margasatwa	Rp 75 miliar
Penghapus cair	Rp 31,6 miliar
Dua ribu pulpen	Rp 678 miliar
Kertas	Rp 212 miliar
Laptop	Rp 238 miliar
Tinta printer	Rp 407 miliar
Lem Aibon	Rp 126 miliar
Lima <i>influencer</i>	Rp 5 miliar
Empat unit <i>smart storage</i>	Rp 53 miliar
Bibit pohon	Rp 30 miliar

SUMBER: PEMPROV DKI, DPRD, ICW, FITRA